

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPM PTSP**

Maksud didirikannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Bengkulu Selatan adalah dalam rangka memberikan informasi bidang Penanaman Modal dan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat yang lebih transparan, mudah, efisien dan efektif, terpadu, tepat waktu dan berkualitas. Dengan demikian melalui pendekatan seperti ini diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif bagi penanam modal dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat Bengkulu Selatan secara keseluruhan.

Adapun prinsip dari pelayanan prima adalah sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993 antara lain : sederhana, jelas, aman, transparan, efisien, ekonomis, adil dan tepat waktu serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Penyelenggaraan PTSP merupakan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses penyelenggaraannya dimulai dari tahap Permohonan sampai ke tahap Penerbitan Dokumen, dilakukan terpadu dalam satu tempat. Pemohon cukup datang ke satu tempat dan bertemu dengan petugas Front Office saja. Hal ini dapat meminimalisasi interaksi antar pemohon dengan petugas perizinan dan menghindari pungutan-pungutan tidak resmi.

Tujuan PTSP pada dasarnya ditujukan untuk menyederhakan birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dalam bentuk :

1. Mempercepat waktu pelayanan, yaitu mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting (misalnya : waktu yang dihabiskan pemohon izin untuk mendatangi berbagai instansi).

Koordinasi yang lebih baik antar instansi yang terkait dengan perizinan, juga akan sangat mempengaruhi terhadap percepatan layanan perizinan.

2. Menekan biaya pelayanan, selain pengurangan tahapan , pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan.
3. Menyederhanakan persyaratan, yaitu mengembangkan system pelayanan parallel akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan Penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga dapat berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.

Beberapa isu strategis yang diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dituangkan dalam matrik analisa SWOT sebagai berikut :

<b>Peluang (Opportunity)</b>	<b>Strategi S-O</b>	<b>Strategi W-O</b>
Eksternal Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Tupoksi dan uraian tugas</li> <li>2. Adanya komunikasi yang baik yang dibangun pada Internal DPM PTSP.</li> <li>3. Adanya rasa kebersamaan dan kerjasama serta koordinasi antar aparat Stake Holder.</li> <li>4. Adanya perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan pelayanan public..</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang perizinan.</li> <li>2. Kurangnya dana untuk melakukan program dan kegiatan.</li> <li>3. Kurangnya jumlah pegawai dalam pelayanan perizinan.</li> <li>4. Kurangnya sarana dan prasarana</li> </ol>
<b>Analisa Lingkungan</b>	<b>Kekuatan (Strenght)</b>	<b>Kelemahan (Weakness)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya program dan kegiatan pemerintah daerah.</li> <li>2. Adanya pelimpahan kewenangan</li> <li>3. Adanya potensi peningkatan pendapatan daerah.</li> <li>4. Adanya komitmen pemerintah terhadap pelayanan perizinan.</li> <li>5. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi usaha penambahan pendapatan dan pencarian sumber dana.</li> <li>2. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan pelayanan perizinan.</li> <li>3. Pendayagunaan dan pemanfaatan system Teknologi Informasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menindaklanjuti kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat dengan semangat otonomi daerah.</li> <li>2. Meningkatkan kemampuan teknis, ketrampilan, profesionalisasi yang kreatif dan inovatif di dalam menggali dan mengembangkan</li> </ol>

terhadap pelayanan publik dalam hal perizinan.		pelayanan public dengan Teknologi Informasi
<b>Tantangan (Treatment)</b>	<b>Strategi S-T</b>	<b>Startegi W-T</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang perizinan.</li> <li>2. Kurangnya dana untuk melakukan program dan kegiatan.</li> <li>3. Kurangnya jumlah pegawai dalam pelayanan perizinan.</li> <li>4. Kurangnya sarana dan prasarana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pelayanan public terhadap perizinan.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas layanan melalui pendidikan dan pelatihan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi terhadap pentingnya pelayanan public yang bersifat efektif dan transparan.</li> <li>2. Memanfaatkan dukungan dana dalam peningkatan kualitas SDM maupun perencanaan yang baik..</li> </ol>

Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan di atas, dapat dirumuskan beberapa strategi dalam rangka optimalisasi institusi berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam analisis SWOT diupayakan menggunakan kekuatan (strength) untuk merebut peluang (opportunity) sehingga dapat dirumuskan strategi S-O menggunakan kekuatan untuk memenangi tantangan (Strategi S-T), meminimalisir kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada (Strategi W-O ), serta mengatasi kelemahan untuk menjawab tantangan (Strategi W-T).

Berdasarkan analisa SWOT di atas maka dapat dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Optimalisasi usaha penambahan pendapatan dan pencarian sumber dana.
2. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan pelayanan perizinan.
3. Pendayagunaan pemanfaatan system Teknologi Informasi.

### **3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang dimulai gaungnya sejak Tahun 2008, telah mengantarkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih memimpin Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode Tahun 2016-2021, dengan Visi “ *Terwujudnya Masyarakat Madani menuju Bengkulu*

*Selatan EMAS* “. Dimensi yang terkandung dalam *EMAS* yaitu mewujudkan Bengkulu Selatan yang maju, Transparan dan Akuntabel, Aspiratif, Normatif, Gotong Royong, berbudaya dan tumbuhnya Sektor Ekonomi usaha rakyat dalam suasana yang nyaman dan aman, serta Interaksi Sosial yang harmonis berlandaskan Kehidupan Masyarakat yang Religius.

**Dalam rangka mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi yaitu :**

1. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui penerapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan public.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan penyediaan infrastruktur berkualitas dan prioritas yang berkeadilan serta berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan peningkatan perekonomian berbasis pada UMKM, industry, ekonomi kreatif dan pariwisata yang berdaya saing, berorientasi pasar dan bernilai tambah.
5. Mewujudkan kedaulatan pangan yang berorientasi pada pengembangan sector pertanian ramah lingkungan.
6. Mewujudkan peran pemuda dan perempuan dalam Pembangunan.
7. Mewujudkan kehidupan social kemasyarakatan yang aman, adil dan harmonis yang bertumpu pada nilai-nilai keagamaan dan kearifan local.

Mengacu pada visi dan misi serta program Kepala Daerah terpilih tersebut, dapat diidentifikasi factor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas poko dan fungsi DPM PTSP antara lain :

<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang perizinan</li> <li>2. Kurangnya dana untuk melakukan program dan kegiatan.</li> <li>3. Kurangnya jumlah pegawai dalam pelayanan perizinan</li> <li>4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Tupoksi dan uraian tugas</li> <li>2. Adanya komunikasi yang baik yang dibangun pada internal DPM PTSP.</li> <li>3. Adanya rasa kebersamaan dan kerjasama serta koordinasi antar aparat Stake Holder.</li> <li>4. Adanya perundang-undangan yang mendukung</li> </ol>

### **3.3. Telaah Renstra DPM PTSP Kabupaten Bengkulu Selatan**

Telaah terhadap renstra dimaksudkan untuk mengemukakan factor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra SKPD.

### **3.4. Telaah Rencana Pelayanan DPM PTSP**

Tujuan terbentuknya Penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dalam bentuk :

- a. Percepatan pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting, misalnya waktu yang dihabiskan oleh pemohon izin untuk mendatangi berbagai instansi.
- b. Menekan biaya pelayanan, selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya Juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan.
- c. Menyederhanakan persyaratan, dengan mengembangkan system pelayanan parallel akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap penekanan biaya tinggi dan waktu penyelesaian.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Dari analisa terhadap isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, dapat ditarik beberapa isu strategis yang menjadi tantangan DPM PTSP Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode Rencana Strategi 5 (lima) tahun ke depan Yaitu :

1. Kualitas Sumber daya aparatur masih rendah
2. Belum optimalnya pelayanan public sesuai standar pelayanan minimal.
3. Belum terhimpunnya sumber-sumber daya alam yang bisa dijual kepada investor.

4. Masih rendahnya etika jajaran pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang baik dan bersih (bebas KKN).
5. Masih rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
6. Masih perlunya pembenahan dalam manajemen ASN berdasarkan sistem merit.
7. Masih perlunya akselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik.
8. Standar dan prosedur pelayanan perizinan masih berbelit.
9. Belum terintegrasi sepenuhnya pelayanan pada satu tempat.